

Analisis Perbandingan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) Pada Kabupaten Magelang Dan Kota Magelang

Nuwun Priyono^{1*}, Wawan Sadtyo Nugroho², Ari Nurul Fatimah¹, Risma Wira Bharata¹

¹ Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

² Prodi S1 Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Magelang

*email: nuwunpriyono@untidar.ac.id

ABSTRACT

Kata Kunci:
FTMS, Faktor
Keuangan,
Faktor
Lingkungan,
Tren
Menguntungkan,
Tren Tidak
Menguntungkan

This study aims to compare trends between financial and environmental factors that occur in Magelang Regency and Magelang City. This research is a descriptive research using data processing from secondary sources. The data analyzed are local government budget realization reports, local government balance sheets, local government operational reports, as well as data released by BPS. The analysis was carried out from 2015-2019 based on the Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) method in Magelang Regency and Magelang City. The results show that the comparison of the FTMS model in Magelang Regency and City in 2015-2019 proves that financial factors in Magelang Regency have 6 sub-indicators that have a favorable trend and 3 sub-indicators have an unfavorable trend. Meanwhile, Magelang City has 5 sub-indicators that have a favorable trend and 4 sub-indicators are unfavorable. Then on environmental factors, there are 2 sub indicators that have a favorable trend and 3 sub indicators that have an unfavorable trend in both Magelang Regency and City. This model can be used as a consideration in improving the financial performance of the two local governments.

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan tren antara faktor keuangan dan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pengolahan data dari sumber sekunder. Data yang dianalisis yaitu laporan realisasi anggaran pemda, neraca pemda, laporan operasional pemda, serta data yang dikeluarkan oleh BPS. Analisis dilakukan dari tahun 2015-2019 dengan berdasarkan metode Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) pada Kabupaten dan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan model FTMS pada Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Tahun 2015-2019 membuktikan bahwa faktor keuangan pada Kabupaten Magelang terdapat 6 sub indikator yang memiliki tren menguntungkan dan 3 sub indikator memiliki tren yang tidak menguntungkan. Sedangkan Kota Magelang 5 sub indikator memiliki tren yang menguntungkan dan 4 sub indikator tidak menguntungkan. Kemudian pada faktor lingkungan, terdapat 2 sub indikator memiliki tren menguntungkan dan 3 sub indikator memiliki

tren tidak menguntungkan baik pada Kabupaten maupun Kota Magelang. Model ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kinerja keuangan di kedua pemerintah daerah tersebut

PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan otonomi daerah. Dalam kebijakan ini terdapat satu kebijakan dibidang keuangan daerah yaitu: kebijakan desentralisasi fiskal. Namun demikian pengelolaan keuangan daerah tetap harus diawasi oleh berbagai pihak sesuai dengan mekanisme pengawasan dalam peraturan perundangan. Agar pengelolaan keuangan daerah menghasilkan kinerja keuangan daerah yang efisien dan efektif. Sehingga dapat meraih tujuan yang telah ditentukan dan dapat mencapai sasaran bagi program-program pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 dan Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang menjadi pijakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pada pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia, diantaranya adalah pelaksanaan salah satu kebijakan dalam keuangan daerah, yaitu kebijakan desentralisasi fiskal. Kedua undang-undang tersebut menjadi perluasan wewenang bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota serta menciptakan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu, otonomi daerah diharapkan dapat menjadi sarana dan media bagi pemerintah daerah untuk mendorong dan menumbuhkan efisiensi dalam ekonomi, efisiensi dalam pelayanan kepentingan publik sehingga mampu meningkatkan/mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah melalui berbagai efek multiplier dari wewenang desentralisasi yang diharapkan mampu terwujud (Khusaini, 2006).

Kabupaten/Kota sebagai wilayah otonom harus mampu mengelola keuangannya secara luas. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki sumber-sumber penerimaan yaitu: berbagai sumber penerimaan atas pengelolaan PAD, sumber-sumber yang lain berasal dari sumber dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun sumber-sumber pembiayaan yang sah lainnya. Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota menggambarkan kemampuan pemerintah daerah terhadap kebutuhan keuangan yang tercermin dalam realisasi anggaran dalam menjalankan program kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Kondisi keuangan yang baik memiliki sejumlah indikator, baik faktor internal maupun faktor eksternal pemerintah daerah.

Kabupaten dan Kota Magelang sebagai suatu daerah yang terletak dalam daerah geografis yang sama perlu dianalisis seberapa jauh kondisi keuangan kedua daerah tersebut. Kedua daerah tersebut mempunyai corak perekonomian yang hampir sama. Terdapat usaha sektor jasa maupun sektor industri. Kedua daerah tersebut mempunyai

perbedaan yang menonjol jika dilihat dari luas wilayah yang dimilikinya. Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah 1.085,73 KM² dan Kota Magelang mempunyai luas wilayah 18,5364 KM². Sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk juga berbeda. Kabupaten Magelang mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.279.625 jiwa. Sedangkan Kota Magelang mempunyai jumlah penduduk 121.872 jiwa (BPS, 2019).

Berikut ini merupakan data jumlah banyaknya realisasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah pada Kabupaten dan Kota Magelang selama periode lima tahun dari tahun 2015-2019.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah
(dalam rupiah)

Tahun	Kabupaten Magelang		Kota Magelang	
	Pendapatan (Rupiah)	Belanja (Rupiah)	Pendapatan (Rupiah)	Belanja (Rupiah)
2014	1.655.674.485.031	1.655.060.222.422	735.116.114.407	682.223.870.407
2015	1.945.955.251.171	1.744.730.814.566	781.335.799.509	736.340.437.750
2016	2.036.310.089.428	2.073.797.409.332	840.042.626.525	871.859.130.603
2017	2.271.336.015.858	2.451.441.154.742	909.525.862.920	879.408.181.447
2018	2.302.190.543.616	2.486.540.561.169	908.089.485.909	937.345.746.470

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan data pada Tabel 1. realisasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah pada kedua pemerintah daerah tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2015-2019 jumlah realisasi pendapatan daerah maupun belanja daerah terus mengalami peningkatan. Penambahan dan peningkatan jumlah tersebut perlu di analisis dan di kaji lebih jauh dalam kerangka kondisi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini akan menganalisis dengan membandingkan kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dengan menggunakan model *Fiscal Trend Monitoring System (FTMS)* periode Tahun 2015-2019

Keuangan Pemda

Keuangan pemerintah daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan menggunakan uang. Dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan daerah sepanjang negara atau daerah atau pihak lainnya belum memiliki dan menguasai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mamesah, 1995 dalam (Halim dan Kusufi, 2012)). Keuangan pemerintah daerah mempunyai ruang lingkup yang dapat meliputi: keuangan daerah yang dikelola secara langsung dan kekayaan daerah yang pengelolaannya terpisah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara langsung yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian keuangan daerah yang pengelolaannya dipisahkan meliputi: Badan Usaha Milik Daerah/BUMD (Abdul Halim dan Kusufi, 2012).

Laporan Keuangan Pemda

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 Tahun 2010 mengenai SAP merupakan suatu standar untuk menyesuaikan baik dalam bentuk maupun isi/substansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD (Suyono, 2016). Bagi pihak eksternal, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting yang dapat menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus benar-benar disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Mahmudi (2011) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari: neraca pemda, LRA pemda, LO pemda, laporan perubahan SAL, laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan arus kas pemda dan catatan atas laporan keuangan pemda. Laporan keuangan tersebut harus disusun pemda secara periodik.

Model Penilaian Kondisi Keuangan *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS)

The International City/Country Management Association (ICMA) pada tahun 1980 telah mengembangkan model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS). ICMA sebagai sebuah asosiasi telah secara jelas mendefinisikan kondisi keuangan pemda sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai layanan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. FTMS adalah sebuah sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam memperkirakan kondisi keuangan pemerintah daerah melalui analisis tren (*trend analysis*) untuk beberapa indikator. Kemudian FTMS dapat mengukur kondisi keuangan pemda dengan menggunakan dua faktor. Adapun kedua faktor tersebut yaitu: faktor keuangan dan faktor lingkungan. Baik faktor keuangan maupun faktor lingkungan memiliki indikator dan sub indikator yang mempunyai rumus/formula yang berbeda. Faktor keuangan terdiri dari indikator pendapatan, indikator belanja, indikator posisi operasi, indikator struktur hutang, indikator hutang di danai, dan indikator kondisi aktiva tetap. Indikator-indikator tersebut juga terdiri dari sub indikator-sub indikator. Faktor lingkungan juga memiliki beberapa indikator seperti: kebutuhan masyarakat & sumberdaya, kendala antar pemerintah, resiko bencana, kultur politik, kondisi ekonomi eksternal. Masing-masing indikator tersebut juga memiliki sub indikator-sub indikator (Ritonga, 2014: 84).

Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah memiliki berbagai macam sumber pendapatan. Adapun sumber pendapatan tersebut meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/dana transfer yang berasal bagian dari pemerintah pusat ke daerah serta pendapatan daerah lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD dapat didefinisikan semua penerimaan/pendapatan daerah yang dapat berasal dari berbagai macam sumber ekonomi daerah yang asli. PAD dapat meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD

sah sesuai ketentuan perundangan (Ritonga, 2010). Menurut Ritonga dan Suhartono (2016) menyebutkan bahwa pendapatan LRA dan pendapatan LO diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer atau dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya.

Belanja Daerah

Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengelompokan biaya ini dapat mempermudah dalam penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan dan dapat juga digunakan dalam penilaian pencapaian kinerja SKPD yang ada di daerah. Selain itu belanja daerah juga dapat dirinci menurut jenis: urusan, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan (Anggaraini dan Puranto, 2010).

Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan dalam membantu manajer publik menilai capaian sebuah strategi melalui tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Tolok ukur kinerja tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Pengukuran kinerja ini sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer untuk dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Setiap rupiah uang yang dibelanjakan oleh pemerintah harus dapat berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik sesuai dengan tuntutan publik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik /masyarakat (Halim dan Kusufi, 2012).

METODE

Jenis penelitian

Penelitian ini memiliki jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan pada pernyataan Santoso (2000) dalam Kuncoro (2011), mengemukakan bahwa umumnya dalam bidang studi statistik deskriptif dapat menyajikan data dalam berbagai bentuk tabel. Setelah itu meringkas atau mengambil inti sari dan menyampaikan data-data tersebut dalam berbagai bentuk tendensi sentral, variasi dan bentuk. Studi deskriptif ini untuk mengetahui dan untuk menjelaskan karakteristik berbagai variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2009). Data yang bersumber dari sumber sekunder merupakan data yang didapat dengan cara tidak langsung dari objek penelitian oleh peneliti. Data ini biasanya telah dikumpulkan oleh berbagai lembaga pengumpul data dan telah dipublikasikan pada

pengguna data (Kuncoro, 2011). Data yang diperlukan adalah APBD, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Operasional dan berbagai data dari BPS. Data keuangan juga diperoleh melalui website: sibata.magelangkab.go.id dan ppid.magelangkota.go.id. Kemudian data yang lain juga didapat dari sumber internet melalui website BPS. Selain itu data juga bersumber dari website dirjen perimbangan keuangan kemenkeu.

Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan pengolahan data sekunder. Sugiyono (2009) menyebutkan bahwa dalam metode penelitian ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi aturan/kaidah-kaidah ilmiah. Adapun aturan/kaidah ilmiah tersebut yaitu: konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

Data Penelitian

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Magelang dan kota Magelang, yang meliputi: APBD tahun 2015-2019, LRA tahun 2015-2019, LO tahun 2015-2019, dan neraca tahun 2015-2019. Kemudian selain itu diperlukan data dari BPS yang berupa: jumlah populasi Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, data rumah tangga miskin/penerima bantuan publik Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, data inflasi dan data tenaga kerja di wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, data jumlah lapangan kerja serta data jumlah pengangguran di wilayah Kabupaten dan Kota Magelang selama tahun 2015-2019.

Metode Analisis

Teknik analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa pada teknik ini data akan dianalisis secara deskriptif atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum untuk digeneralisasi. Termasuk penyajian data melalui tabel dan perhitungan persentase. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan statistik deskriptif kemudian akhirnya akan dilakukan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian pengukuran dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap nilai rasio yang ada dalam faktor keuangan dan juga nilai rasio dari faktor lingkungan baik yang ada di Kota Magelang dan maupun di pemda Kabupaten Magelang. Kemudian hasilnya akan diperbandingkan antara kedua pemda dan akhirnya akan diambil kesimpulan terhadap kondisi keuangan kedua Pemda tersebut. Penelitian ini tidak mengambil semua faktor dan indikator dalam model FTMS, tetapi diambil beberapa faktor keuangan dan faktor lingkungan dalam analisis penilaian kondisi keuangan pemda karena keterbatasan data penelitian yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini tidak semua indikator dan sub indikator yang ada dalam model FTMS tersebut menjadi bahan acuan /pedoman dalam melakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah, karena adanya keterbatasan dalam perolehan data penelitian. Namun data-data penelitian yang ada sudah cukup digunakan dalam menilai kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dengan model FTMS. Data yang dilakukan penilaian model adalah data selama 5 tahun berturut-turut yaitu: Tahun 2015-2019. Terdapat 4 indikator faktor- faktor keuangan yaitu: pendapatan, belanja, posisi operasi dan struktur hutang. Dari ke 4 indikator tersebut terdapat 9 sub indicator dari faktor keuangan.

Faktor Keuangan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang

Data kondisi faktor keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Tahun 2015-2019 menggambarkan bahwa sub indikator pendapatan per kapita pada Kabupaten Magelang selama 5 tahun berturut turut mengalami tren peningkatan, walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Akan tetapi jika dilihat dari trend peringatan dini masih dinilai menguntungkan, karena dalam sub indikator pendapatan per kapita ini tren nya bisa naik dan turun. Sub indikator pendapatan pajak diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 terjadi tren yang tidak diharapkan (tidak menguntungkan) dikarenakan pendapatan pajaknya menurun. Terjadi penurunan pendapatan pajak ditahun 2016 sebesar 10,1%. Akan tetapi pada tahun 2017- 2019 keadaan terjadi sebaliknya terdapat tren yang diharapkan atau tren yang menguntungkan karena terjadi peningkatan pendapatan pajak rata-rata sebesar 25,8% setiap tahunnya. Sub indikator surplus atau defisit pendapatan mempunyai tren yang menguntungkan, karena dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan.

Selanjutnya sub indikator belanja per kapita pada tahun 2016 menunjukkan tren yang diharapkan, akan tetapi ditahun 2017-2019 menunjukkan tren yang tidak diharapkan karena nilai belanja perkapita selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari besaran nilai belanja operasional neto (harga konstan) yang terus mengalami peningkatan nilainya jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Magelang. Sub indikator belanja per fungsi dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan terus menerus. Hal ini menunjukkan terdapat tren yang tidak diharapkan. Nilai belanja operasional untuk suatu fungsi apabila dibandingkan dengan total belanja operasional neto nilainya selalu mengalami kenaikan dari 16% ditahun 2015 mengalami peningkatan sampai dengan 40% ditahun 2019. Sub indikator belanja tetap, pada tahun 2016 menunjukkan tren yang tidak menguntungkan karena nilainya mengalami peningkatan. Namun pada tahun berikutnya menunjukkan tren yang menguntungkan karena nilainya selalu mengalami penurunan.

Hal lain dapat dilihat dari sub indikator surplus atau deficit operasional Kabupaten Magelang menunjukkan dua tren menguntungkan dan tren tidak menguntungkan. Pada tahun 2016 menunjukkan tren tidak menguntungkan karena mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2017-2019 trennya menunjukkan nilai yang menguntungkan karena selalu mengalami penurunan. Sub indikator likuiditas menunjukkan dua nilai tren baik yang menguntungkan maupun tren yang tidak menguntungkan. Pada tahun 2015-2016 menunjukkan tren yang menguntungkan karena nilai likuiditas yang dimiliki Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2017-2019 tren likuiditasnya mengalami penurunan yang menunjukkan nilai kurang menguntungkan bagi kondisi keuangan pemerintah daerah. Meskipun jika dilihat pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan yang cukup tajam, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2017 nilainya masih tetap menurun.

Kemudian sub indikator pendapatan per kapita pada Kota Magelang selama 5 tahun berturut turut dari tahun 2015-2019 mengalami trend peningkatan, walapun peningkatannya rata-rata hanya sebesar 6 %. Akan tetapi sudah menggambarkan tren peningkatan yang positif. Dalam arti bahwa sub indikator pendapatan perkapita pada tren yang menguntungkan. Sub indikator pendapatan pajak diatas terlihat bahwa pada tahun 2015-2019 terjadi tren yang diharapkan dikarenakan pendapatan pajaknya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2016 hanya sedikit terjadi penurunan sekitar 3%. Akan tetapi pada tahun 2017-2019 trennya meningkat yang berarti penilaian kondisi keuangan pemda Kota Magelang pada tren yang menguntungkan.

Sub indikator surplus atau defisit pendapatan pada Kota Magelang juga mempunyai tren yang meningkat. Dari tahun 2015-2017 selalu mengalami kenaikan yang berarti terjadi tren yang tidak menguntungkan. Sedangkan ditahun 2017-2018 mengalami penurunan yang berarti kondisi keuangan dalam tren yang menguntungkan. Dan pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan lagi yang berarti berada pada tren yang kurang menguntungkan. Sub indikator belanja per kapita pada tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang tidak diharapkan karena nilai belanja perkapita selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari besaran nilai belanja operasional neto (harga konstan) yang terus mengalami peningkatan nilainya jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang ada di Kota Magelang.

Selanjutnya sub indikator belanja per fungsi dari tahun 2015-2016 di Kota Magelang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan terdapat tren yang tidak diharapkan. Kemudian di tahun 2016-2019 mengalami tren yang menurun yang berarti masuk dalam kategori tren yang menguntungkan. Pada tahun 2016- 2017 menunjukkan tren yang menguntungkan karena nilainya mengalami penurunan. Namun pada tahun berikutnya menunjukkan tren yang kurang menguntungkan karena nilainya mengalami peningkatan walaupun angkanya sedikit. Sub indikator surplus atau defisit operasional menunjukkan tren yang menguntungkan. Pada tahun 2015-2019 menunjukkan tren

dengan nilai yang selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan pmda dari sisi sub indikator surplus atau defisit operasional menguntungkan.

Sub indikator likuiditas menunjukkan dua nilai tren baik yang menguntungkan maupun tren yang tidak menguntungkan. Pada tahun 2015-2016 menunjukkan tren yang tidak menguntungkan karena nilai likuiditas yang dimiliki Kota Magelang mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2016-2017 tren likuiditasnya mengalami kenaikan yang menunjukkan nilai menguntungkan bagi kondisi keuangan pemerintah daerah. Dan di tahun 2018-2019 mengalami tren yang kurang menguntungkan karena nilai mengalami peningkatan lagi. Tahun 2015-2016 menunjukkan tren yang tidak menguntungkan karena mengalami peningkatan yang cukup tajam. Kemudian tahun 2017-2019 mengalami tren yang menguntungkan karena nilainya mengalami penurunan.

Faktor Lingkungan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang

Kemudian kondisi keuangan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang jika dilihat dari faktor-faktor lingkungan, terdapat satu indikator kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang mencakup 5 sub indikator mengenai data faktor lingkungan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dalam kurun waktu Tahun 2015-2019.

Sub indikator populasi tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan pada indikator jumlah penduduk atau populasi yang ada di Kabupaten Magelang dari tahun ketahun mengalami tren kenaikan yang berarti bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Pada sub indikator populasi tren bisa naik maupun turun, tergantung apabila kenaikan jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan pendapatan per kapita. Sub indikator kepadatan penduduk, terlihat bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya tren yang kurang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan khususnya faktor lingkungan.

Sub indikator yang lainnya pada sub indikator umur yang ada di Kabupaten Magelang, terlihat bahwa jumlah penduduk yang mempunyai umur dibawah 18 tahun dan diatas 64 tahun menunjukkan tren yang kurang menguntungkan karena jumlahnya selalu mengalami peningklatan dari tahun 2015-2019.. Hal ini menunjukkan adanya tren yang tidak diharapkan bagi penilaian kondisi keuangan khususnya faktor lingkungan. Adanya tren yang kurang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah pada faktor lingkungan khususnya pada tahun 2015-2017 karena jumlah pengangguran mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2017-2018 menunjukkan tren yang menguntungkan karena angka pengangguran mengalami penurunan. Akan tetapi naik lagi pada tahun 2019.

Sub indikator jumlah lapangan kerja di masyarakat diatas menunjukkan adanya tren yang kurang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah pada faktor lingkungan khususnya pada tahun 2015-2016 karena jumlah lapangan kerja

yang tersedia dimasyarakat mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2016-2017 menunjukkan tren yang menguntungkan karena angka lapangan kerja mengalami peningkatan. Akan tetapi turun lagi pada tahun 2017-2019 yang menunjukkan tren kurang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah.

Kemudian pada Kota Magelang, sub indikator populasi menunjukkan bahwa faktor lingkungan pada indikator jumlah penduduk atau populasi yang ada di Kota Magelang dari tahun ketahun mengalami tren penurunan yang berarti bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Pada sub indikator populasi tren bisa naik maupun turun, tergantung apabila kenaikan jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan pendapatan perkapita. Sub indikator kepadatan penduduk, terlihat bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kota Magelang selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya tren yang kurang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan khususnya faktor lingkungan.

Sub indikator umur di Kota Magelang, terlihat bahwa jumlah penduduk yang mempunyai umur dibawah 18 tahun dan diatas 64 tahun menunjukkan tren yang kurang menguntungkan dan menguntungkan karena terjadi dua tren naik dan turun. Pada tahun 2015-2018 jumlahnya selalu mengalami peningkatan yang menandakan dalam posisi tren yang kurang menguntungkan sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan yang berarti dalam tren yang menguntungkan.

Adanya tren yang kurang menguntungkan dan tren yang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah pada faktor lingkungan khususnya pada tahun 2015-2019 karena jumlah pengangguran mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2015-2018 menunjukkan tren yang kurang menguntungkan karena angka pengangguran mengalami peningkatan. Akan tetapi ditahun 2018-2019 mengalami penurunan yang berarti dalam tren yang menguntungkan. Sub indikator jumlah lapangan kerja di masyarakat diatas menunjukkan adanya tren yang menguntungkan bagi penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah pada faktor lingkungan khususnya pada tahun 2015-2019 karena jumlah lapangan kerja yang tersedia dimasyarakat mengalami peningkatan.

Perbandingan Kondisi Keuangan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dengan Model Fiscal Trend Monitoring System Tahun 2015-2019

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir baik Kabupaten Magelang maupun Kota Magelang, dilihat dari kondisi faktor keuangan menunjukkan dua tren baik tren menguntungkan maupun tren tidak menguntungkan. Tren tersebut dapat digunakan oleh pemda untuk memperbaiki kondisi keuangan yang dimilikinya selama 5 tahun terakhir baik Kabupaten Magelang maupun Kota Magelang. Kemudian jika dilihat dari kondisi pada faktor lingkungan yang sudah dijelaskan melalui tabel diatas, menunjukkan dua tren baik tren menguntungkan maupun tren tidak menguntungkan. Tren

tersebut dapat digunakan oleh pemda untuk memperbaiki kondisi pada faktor lingkungan yang dimilikinya.

PEMBAHASAN

Perbandingan Faktor Keuangan Kabupaten dan Kota Magelang Dengan Model FTMS Tahun 2015-2019

Faktor keuangan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang akan diperbandingkan melalui model FTMS. Kedua daerah terletak dalam posisi geografis yang sama, yaitu mempunyai wilayah yang berbatasan langsung di kedua daerah, sehingga secara geografis hampir sama.

Tabel 2. Tren Model FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Tahun 2015-2019

No	Sub Indikator	Kabupaten Magelang	Kota Magelang
1	Pendapatan Per Kapita	Menguntungkan	Menguntungkan
2	Pendapatan Pajak	Menguntungkan	Menguntungkan
3	Surplus atau deficit pendapatan	Menguntungkan	Tidak Menguntungkan
4	Belanja Tetap	Menguntungkan	Menguntungkan
5	Likuiditas	Menguntungkan	Tidak Menguntungkan
6	Surplus atau deficit operasional	Menguntungkan	Menguntungkan
7	Belanja per kapita	Tidak menguntungkan	Tidak Menguntungkan
8	Belanja per fungsi	Tidak menguntungkan	Menguntungkan
9	Hutang jangka pendek	Tidak menguntungkan	Tidak Menguntungkan

Sumber: Data diolah Penulis

Sembilan sub indikator faktor keuangan tersebut, Kabupaten Magelang terdapat 6 sub indikator tren menguntungkan dan 3 sub indikator yang tidak menguntungkan. Sedangkan Kota Magelang memiliki 5 sub indikator yang trennya menguntungkan dan 4 sub indikator dengan tren yang kurang menguntungkan. Terdapat 4 sub indikator yang sama sama menguntungkan bagi kondisi keuangan kedua pemda tersebut, yaitu: pendapatan per kapita, pendapatan pajak, belanja tetap dan surplus atau defisit operasional.

Perbandingan Faktor Lingkungan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Tahun 2015-2019

Jika dilihat dari faktor lingkungan, antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dapat diperbandingkan dengan melihat Tabel 7 berikut ini.

Tabel 3. Tren Model FTMS Faktor Lingkungan Kabupaten Magelang dan Kota Magelang tahun 2015-2019

No	Sub Indikator	Kabupaten Magelang	Kota Magelang
1	Populasi (jumlah penduduk)	Menguntungkan	Menguntungkan
2	Lapangan Kerja	Tidak Menguntungkan	Menguntungkan
3	Kepadatan Penduduk	Tidak Menguntungkan	Tidak Menguntungkan
4	Umur	Tidak Menguntungkan	Tidak Menguntungkan
5	Pengangguran	Menguntungkan	Tidak Menguntungkan

Sumber: Data diolah Penulis

Kelima sub indikator faktor lingkungan baik Kabupaten Magelang maupun Kota Magelang, terdapat masing-masing 2 sub indikator yang memiliki tren yang menguntungkan dan 3 sub indikator yang memiliki tren yang kurang menguntungkan. Pada sub indikator populasi baik Kabupaten maupun Kota Magelang sama sama memiliki tren yang menguntungkan. Artinya populasi yang ada di kedua pemerintah daerah tersebut sebagai salah satu kekuatan dalam mengelola kondisi keuangan pemda.

Sub indikator lapangan kerja untuk Kabupaten Magelang sebagai sub indikator yang kurang menguntungkan sedangkan untuk Kota Magelang merupakan sub indikator yang menguntungkan. Sub indikator pengangguran menunjukkan hasil sebaliknya. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai sub indikator yang mempunyai tren menguntungkan, sedangkan bagi Kabupaten Magelang merupakan sub indikator yang kurang menguntungkan. Sub indikator lapangan kerja dikatakan menguntungkan bagi penilaian kondisi pemda dapat diartikan bahwa jumlah lapangan kerja yang tersedia banyak di wilayah tersebut. Angka pengangguran yang rendah menyebabkan salah satu kekuatan bagi penilaian kondisi keuangan di wilayah kabupaten/kota.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Tahun 2015-2019 terdiri dari 9 sub indikator faktor keuangan dan 5 sub indikator faktor lingkungan.
2. Dari 9 sub indikator faktor keuangan yang dilakukan analisis pada Tahun 2015-2019, terdapat 6 sub indikator tren menguntungkan dan 3 sub indikator yang tidak menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, sedangkan untuk Pemerintah Kota Magelang memiliki 5 sub indikator yang trennya menguntungkan dan 4 sub indikator dengan tren yang kurang menguntungkan.
3. Dari 5 sub indikator faktor lingkungan yang dilakukan analisis pada Tahun 2015-2019, terdapat 2 sub indikator tren menguntungkan dan 3 sub indikator yang tidak menguntungkan baik bagi Pemerintah Kabupaten Magelang maupun bagi Pemerintah Kota Magelang.

Saran

Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dapat meningkatkan kinerja keuangannya pada sub indikator-sub indikator keuangan yang dalam tren kurang menguntungkan sehingga diharapkan bahwa kondisi keuangan yang dalam tren kurang menguntungkan meningkat menjadi dalam kondisi tren yang menguntungkan bagi kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Bagian kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian atau temuan penelitian, yang berkorelasi dengan tujuan penelitian yang dituliskan dalam bagian pendahuluan. Kemudian, nyatakan poin utama dari diskusi. Sebuah kesimpulan umumnya diakhiri dengan sebuah pernyataan tentang bagaimana karya penelitian berkontribusi pada bidang studi secara keseluruhan (implikasi hasil penelitian). Kesalahan umum pada bagian ini adalah mengulangi hasil eksperimen, abstrak, atau disajikan dengan sangat daftar. Bagian kesimpulan harus memberikan kebenaran ilmiah yang jelas. Selain itu, pada bagian kesimpulan juga dapat memberikan saran untuk eksperimen di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Yunita dan B. Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Edisi 1. Cetakan ke-1. STIM YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2019*
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2020*
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke- 4. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Penerbit: BPFE Unibraw. Malang
- Kloha, P, Weissert, CS & Kleine, R .2005. *Developing and Testing a Composite Model To Predict Local Fiscal Distress*. Public Administration Review. Vol. 65. No 3 . PP. 313-323.
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Keempat. Penerbit: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Metode Penghitungan Potensi PAD*. Penerbit: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah (LKMPD). Yogyakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan kesatu. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ritonga, IT & Suhartono, E. 2016. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Lanjutan*. Cetakan kesatu. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Rivenbark, WC, Roenigk, DC & Allison, GS. 2009. *Communicating Financial Condition To Elected Officials In Local Government*. Popular Government Vol. 77. No. 1 PP. 4-13

- Sekaran, Uma.2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat Jakarta
- Sugiyono. 2009.*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Cetakan kedelapan. Penerbit: Alfabeta. Bandung
- Suyono, N. A. (2016). *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Wonosobo)*, 237–248.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*